

MEMBACA INDIKATOR PENURUNAN DAYA BELI

Edy Burmansyah¹⁾ dan Ade Parlaungan Nasution²⁾

Peneliti pada Martapura Institute,²⁾ Dosen Tetap STIE Labuhanbatu, Rantauprapat

Abstrak

Kondisi perekonomian yang mengalami tekanan pada permintaan (kelebihan persediaan) dan penurunan harga, akan diikuti oleh gejolak pada nilai tukar, sehingga dapat berimplikasi pada sisi pendanaan, dimana suku bunga pinjaman melonjak tinggi. Situasi ini dapat mengiring perekonomian masuk dalam tahapan resesi.

Situasi memburuknya daya beli masyarakat sesungguhnya sudah terjadi sejak Oktober tahun lalu (2016) dimana inflasi tercatat sebesar 3,08% atau turun sebesar 3,17% dibandingkan bulan yang sama tahun 2015 yang terekam sebesar 6,25%.

Penurunan inflasi yang terjadi belakangan ini, bukan disebabkan oleh efisiensi biaya seperti biaya logistik atau biaya produksi, namun disebabkan oleh merosotnya konsumsi, yang dilatarbelakangi melemahnya daya beli. Secara teoritis, ketika permintaan (konsumsi) turun maka penawaran mengalami kelimpahan, akibatnya harga mengalami penurunan. Situasi ini disebut kalangan ekonom sebagai deflation spiral.

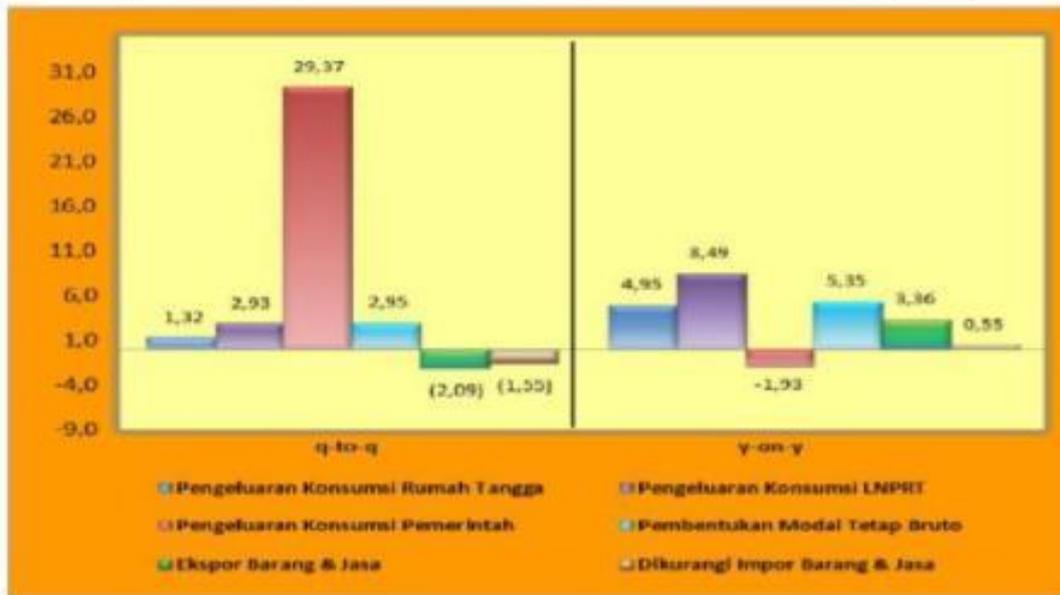
Kata Kunci : daya beli, efisiensi biaya, inflasi, perekonomian nasional

Pendahuluan

Setelah sempat meredah sejenak karena tertutup oleh berbagai peristiwa lain, pemberitaan tentang penurunan daya beli masyarakat kembali ramai diperbincangkan, usai pernyataan Jokowi pada 8 Oktober lalu yang menuding isu penurunan daya beli dipolitisasi untuk menurunkan citra pemerintah menjelang tahun politik 2019 mendatang.

Isu penurunan daya beli bermula dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2017 hanya mencapai 4,95 persen, atau turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (2016) yang mencapai 5,07 persen. Sumbangan konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2017 sebesar 2,65 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (2016) yang mampu menembus angka 2,72 persen.

Laju Pertumbuhan PDB Menurut Jenis Pengeluaran Triwulan II-2017 (persen)



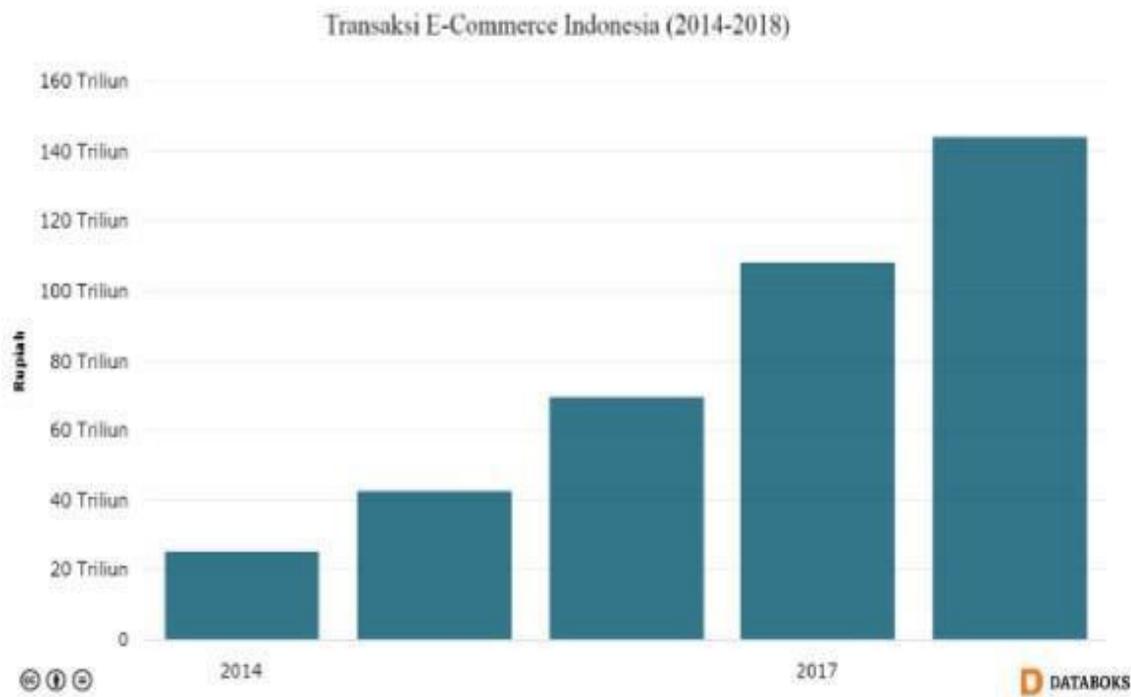
Dalam laporannya berjudul "Indonesia Economic Quarterly: Closing The Gap" yang dirilis 3 Oktober lalu. Bank Dunia menyebutkan pada kwartal II 2017 terutama pada saat Ramadan dan Idul Fitri terjadi penurunan inflasi dari komoditas, padahal biasanya pada masa ini justru terjadi peningkatan signifikan dalam konsumsi rumah tangga. Fenomena penurunan konsumsi rumah tangga tersebut jelas membingungkan Bank Dunia.

Ditengah kebingungan terhadap fenomena penurunan konsumsi rumah tangga dimasa Ramadan dan Idul Fitri, Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 dari sebelumnya sebesar 5,2% menjadi 5,1%. Revisi ini juga didasari pada perkembangan ekonomi Indonesia yang tumbuh stagnan sebesar 5,01% pada kuartal II 2017.

Penurunan konsumsi rumah tangga tersebut menurut pemerintah bukan disebabkan penurunan daya beli, namun diakibatkan oleh terjadi peralihan pola konsumsi masyarakat dari belanja ritel offline menuju daring (online), serta aksi masyarakat memiliki uang menahan diri dalam berbelanja dan mengalihkan dana ke tabungan (*switching to saving*)

Argumen peralihan pola belanja ritel offline menuju daring (online) menurut saya sangat bias perkotaan (terutama kota-kota besar/ibu kota provinsi di Indonesia). Transaksi online sejauh ini hanya berkembang di kota-kota besar seperti Jakarta, Denpasar, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Palembang, Semarang dan beberapa ibu kota provinsi. Sementara di kabupaten/kota seperti Bojonegoro, Pangkalan Brandan, Muara Enim, Kolaka, Indra Giri dan sebagainya, terlebih lagi di wilayah pedesaan—dimana sebagai besar penduduk Indonesia bermukim—masyarakat masih datang belanja ke pasar dan warung.

Keberadaan transaksi online yang berkembang di kota-kota besar dapat dilihat nilai transaksi online yang masih terbilang kecil, katadata.co.id dalam laporannya menyebutkan nilai transaksi E-Commerce hingga November 2016 hanya sebesar 69,8 triliun. Nilai transaksi ini masih sangat kecil bila dibandingkan total konsumsi rumah tangga kuartal III tahun 2016 yang nilainya mencapai Rp 1.307,7 triliun.



Bahkan menurut laporan perusahaan jasa logistik JNE pertumbuhan volume pengiriman barang hanya sebesar 30%. Berbeda seperti klaim presiden Jokowi yang menyebut pertumbuhan pengiriman barang mencapai 130%.

Sebelumnya, saat menyampaikan sambutan dalam rapat yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, 3 Oktober 2017, Jokowi memastikan tak ada penurunan daya beli masyarakat. Yang terjadi, menurut Jokowi, adalah pergeseran belanja masyarakat ke medium digital. Jokowi mendasarkan penilaiannya kepada dua hal: penerimaan jasa kurir dan pajak dari sewa gudang yang sama-sama meningkat. Keduanya, menunjukkan pesatnya pertumbuhan e-commerce.

Menurut data yang dia dapat, pengiriman oleh jasa kurir meningkat sebesar 130% pada bulan September. Angka ini, kata Jokowi, didapat dari pengiriman PT Pos Indonesia dan jasa pengiriman swasta seperti JNE dan Tiki.

Disisi lain, meskipun mengakui terjadi penurunan konsumsi masyarakat, namun menurut ekonom Faisal Basri penurunan konsumsi tersebut tidak mencerminkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Sebaliknya penurunan konsumsi tersebut diakibatkan kelompok menengah-atas berjaga-jaga dengan menaikkan nilai tabungan. Ini dilihat dari dana pihak ketiga rumah tangga di perbankan pada bulan Mei 2017 yang secara total naik 9,259% jika dibandingkan dengan Mei 2016.

Dalam laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pertumbuhan jumlah rekening dan nominal total simpanan yang dijamin pada bank umum per Agustus 2017 bertambah sebanyak 4.606.866 rekening atau naik sebesar 2,07%, dari 222.462.654 rekening menjadi 227.069.520 rekening pada bulan Agustus.

Namun, kenaikan ini terutama terjadi pada simpanan dengan nilai saldo hingga Rp 2 miliar. Jumlah rekeningnya meningkat sebesar 2,07% (MoM), dari 222.218.149 rekening di Juli 2017 menjadi 226.823.420 rekening pada Agustus 2017. Sedangkan, simpanan dengan nilai saldo di atas Rp 2 miliar, jumlah rekeningnya naik 0,65% (MoM), dari 244.511 rekening per Juli 2017 menjadi 246.100 rekening di Agustus 2017.

Distribusi Rekening berdasarkan Rekening Yang Dijamin (Distribution of Accounts by Insured Accounts) Agustus 2017

Keterangan	Nominal Simpanan	Jumlah Rekening	%
Rekening untuk Simpanan yang Dijamin Seluruhnya	≤ 2 Miliar	226.823.420	99,89%
Rekening untuk Simpanan yang Dijamin Sebagian	> 2 Miliar	246.100	0,11%
Total Rekening		227.069.520	100,00%

Sumber: LPS 2017

Data ini menjelaskan bahwa kenaikan DPK Bank hanya terjadi pada kelompok kelas menengah-atas (mereka yg memiliki saldo simpanan Rp 2 miliar hingga Rp 2 Miliar keatas) yang tidak mencerminkan kondisi kemampuan masyarakat seluruhnya. Terlebih dari lebih 250 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 60 juta orang saja yang memiliki rekening di Bank

Argumen bahwa tidak terjadi penurunan daya beli dengan menggunakan data DPK Bank dan peralihan belanja ritel offline ke online, jelas sangat bias, terutama perkotaan dan kelas menengah-atas. Padahal sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah pedesaan dan banyak yang tidak memiliki rekening bank.

Pada sisi lain, jika memang kelompok kelas menengah-atas mengalihkan dana ke tabungan dan menahan diri untuk tidak belanja, maka seharusnya transaksi online tidak mengalami pertumbuhan, karena transaksi online sebgaiian besar dilakukan melalui perbankan. Dengan kata lain, jika pertumbuhan belanja online meningkat maka DPK Bank menurun, begitu juga sebaliknya.

Pada kenyataan ditengah kenaikan DPK Bank, nilai transaksi E-Commerce justru terus meningkat. Tahun 2014 nilai transaksi E-Commerce sebesar Rp 25,1 triliun, kemudian naik menjadi Rp 42,5 triliun tahun 2015, dan naik lagi jadi Rp 69,8 triliun tahun 2016. Tahun 2017 nilai diprediski tembus angka Rp 108,4 triliun.

Ini menggambarkan bahwa argument pemerintah dengan menggunakan data transaksi online dan DPK Bank untuk membantah tidak ada penurunan daya beli masyarakat, sangat rapuh dan lemah. Umumnya alat untuk membaca daya beli masyarakat adalah Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental; (1) Interaksi permintaan-penawaran, (2) Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang (3) Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen. Turunnya inflasi inti menjadi indikator untuk menunjukkan penurunan daya beli masyarakat.

Laporan BPS menyebutkan Inflasi inti untuk Agustus 2017 sebesar 0,28% turun dibandingkan agustus tahun lalu yang mencapai 0,36%, begitu pula untuk bulan Juli 2017 yang hanya sebesar 0,26% turun dibandingkan Juli 2016 yang mencapai 0,34%, demikian juga untuk Juni 2017 yang hanya sebesar 0,26% turun dibandingkan Juni 2016 yang mencapai 0,33%.

Dari sisi neraca perdagangan, indikasi melemahnya daya beli dikonfirmasi oleh turunnya impor barang-barang konsumsi. Impor barang konsumsi Indonesia turun 12,77% pada Juni 2017 dibandingkan dengan Mei 2017. Bahkan survey Bank Indonesia (BI) atas Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2017 sebesar 122,4 atau turun 3,5 poin dari Mei 2017. Penurunan ini menurut BI disebabkan persepsi konsumen terhadap terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, baik pada saat ini maupun dalam 6 bulan mendatang. Situasi memburuknya daya beli masyarakat sesungguhnya sudah terjadi sejak Oktober tahun lalu

(2016) dimana inflasi tercatat sebesar 3,08% atau turun sebesar 3,17% dibandingkan bulan yang sama tahun 2015 yang terekam sebesar 6,25%.

Penurunan inflasi yang terjadi belakangan ini, bukan disebabkan oleh efisiensi biaya seperti biaya logistik atau biaya produksi, namun disebabkan oleh merosotnya konsumsi, yang dilatarbelakangi melemahnya daya beli. Secara teoritis, ketika permintaan (konsumsi) turun maka penawaran mengalami kelimpahan, akibatnya harga mengalami penurunan. Situasi ini disebut kalangan ekonom sebagai deflation spiral.

Indeks Umum, Inti, Harga Yang Diatur Pemerintah, dan Barang Bergejolak Inflasi Indonesia, Januari 2016 - September 2017

Tahun/Bulan	Umum	Inti	Harga Yang Diatur Pemerintah	Barang Bergejolak
2017	2.66	2.51	7.51	-1.56
September	0.13	0.35	0.15	-0.67
Agustus	-0.07	0.28	-0.48	-0.87
Juli	0.22	0.26	0.07	0.17
Juni	0.69	0.26	2.10	0.65
Mei	0.39	0.16	0.69	0.91
April	0.09	0.13	1.27	-1.26
Maret	-0.02	0.10	0.37	-0.77
Februari	0.23	0.37	0.58	-0.36
Januari	0.97	0.56	2.57	0.67
2016	3.02	3.07	0.21	5.92
Desember	0.42	0.23	0.97	0.47
November	0.47	0.15	0.13	1.84
Oktober	0.14	0.10	0.57	-0.26
September	0.22	0.33	0.14	-0.09
Agustus	-0.02	0.36	-0.52	-0.80
Juli	0.69	0.34	1.32	1.20
Juni	0.66	0.33	0.72	1.71
Mei	0.24	0.23	0.27	0.32
April	-0.45	0.15	-1.70	-1.04
Maret	0.19	0.21	-0.35	0.75
Februari	-0.09	0.31	-0.76	-0.68
Januari	0.51	0.29	-0.55	2.40

Sumber: Bps 2017

Dalam berbagai literatur ekonomi, deflation spiral lebih berbahaya dibandingkan dengan inflasi, terlebih bila berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, dapat berdampak disinsentif bisnis untuk mendorong produksi, sehingga memaksa pelaku usaha melakukan pengetatan biaya dan serta pengurangan bahkan peniadaan kegiatan investasi. Salah satu cara pengetatan yang dilakukan adalah mengurangi tenaga kerja dan selanjutnya mengurangi belanja yang dampaknya secara agregasi mengurangi permintaan yang berdampak terjadinya kelebihan persediaan (*excessive supply*).

Kondisi perekonomian yang mengalami tekanan pada permintaan (kelebihan persediaan) dan penurunan harga, akan diikuti oleh gejolak pada nilai tukar, sehingga dapat berimplikasi pada sisi pendanaan, dimana suku bunga pinjaman melonjak tinggi. Situasi ini dapat mengiring perekonomian masuk dalam tahapan resesi.

Meskipun melalui pendekatan berbeda (teori overinvestment), ekonom senior Kwik Kian Gie seperti dikutip Kontan.co.id (11/10) memperingatkan ancaman perekonomian Indonesia yang masuk dalam tahapan resesi.

Dalam kaitan itu, ketimbang berusaha terus-terus membantah penurunan daya beli, akan jauh lebih baik bila Jokowi dan team-nya fokus mewaspadaai tanda-tanda resesi, dan menyiapkan langkah-langkah jitu agar perekonomian tidak terjerembab kembali kedalam jurang yang sama.***

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Oktober 2017

Endy Dwi Tjahjono, dkk, Pengukuran Inflasi Inti (Core Inflation) di Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 2000

Lembaga Penjamin Simpanan, Distribusi Simpanan Bank Umum Pridoe Agustus 2017 Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Triwulan II-2017

Milton Friedman, Inflation, Causes and Consequence, Asia Publishing House, New York, 1963
World Bank, Indonesia Economic Quarterly: Closing The Gap, October, 2017